

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel Ilmiah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEIKUTSERTAAN BPJS KESEHATAN PADA PEKERJA SEKTOR
INFORMAL INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI KECAMATAN
MARGOYOSO KABUPATEN PATI
TAHUN 2016

Disusun Oleh

Muhammad Hani Rahmawan

D11.2012.01452

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan di Sistem
Informasi Tugas Akhir (SIADIN)


Pembimbing
(Agus Perry Kusuma, S.KG.,M.Kes)

FACTORS INFLUENCE OF BPJS PARTICIPATION ON INFORMAL INDUSTRIES TEPUNG TAPIOKA IN MARGOYOSO SUBDISTRICT PATI 2016

Muhammad Hanif Rahmawan*), Agus Perry Kusuma)**

*)Alumni Fakultas Kesehatan Univeristas Dian Nuswantoro

**)Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro

JL Nakula 1 No 5-11 Semarang

Email : 411201201452@mhs.dinus.ac.id

ABSTRACT

Background : Informal sector workers in Indonesia igetting more is become a challenge for the government in organizing the Social Security which become the right of every citizen. As stipulated in Law No. 40 of 2004 that every worker must be receive the National Social Security. But the government's target has not been fully achieved. Based on data from the Central Statistics Agency, Central Java in 2013 stated that as many as 12.9 million workers who already registered for the new BPJS 135 714 workers amounted to only 1.05%. While BPJS Karisidenan Pati Regency mention that formal and informal participation of workers as much as 25 628 of a total target of 46,000 participants.

Method : This study was analytic research with cross sectional approach. The population in this study was informal sector workers in industrial in the village of Ngemplak Margoyoso Kidul District Pati regency. The number of samples in this study were 96 samples of workers with a total of 10 industrial starch taken by purposive sampling technique. The research instrument used questionnaire processed by SPSS statistical test C-Square.

Result : The results showed no relationship between the worker's salary (p 0.000) and owner of industrial policy (0.0001) against the participation BPJS on informal workers in the village of Tapioca Starch Industry Ngemplak Kidul District Margoyoso Pati Regency 2016.

Conclusion : Based on the research results should the government especially the BPJS Branch Pati district need to socialize more to the owners of informal industries and provide a punishment to companies that do not include employees on the program BPJS, and it needs to be monitoring of the Manpower District Pati against industry specific region Starch. As for the owners Industry should consider the welfare of workers, the longer working also further increase revenue and industry owners also pay attention to the safety and health of its workers by incorporating it into Medicare.

Keywords : BPJS Health, Informal Sector Workers, Informal Sector Workers.

ABSTRAK

Latar Belakang : Tingginya pekerja sektor informal di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial yang mana sudah menjadi hak setiap warga negara. Sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan Jaminan Sosial Nasional. Namun target pemerintah tersebut belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2013 disebutkan bahwa sebanyak 12,9 juta pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS baru 135.714 pekerja hanya sebesar 1,05 %. Sedangkan data Kepesertaan BPJS Karisidenan Kabupaten Pati menyebutkan bahwa kepesertaan pekerja formal maupun informal sebanyak 25.628 dari total target 46.000 peserta.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja sektor informal pada industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 sampel pekerja dengan total sebanyak 10 industri tepung tapioka yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner yang diolah dengan SPSS menggunakan uji statistik *C-Square*.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara gaji pekerja ($p < 0,000$) dan kebijakan pemilik industri ($0,000$) terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan pada pekerja informal Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2016.

Saran : Berdasarkan hasil penelitian maka sebaiknya pihak Pemerintah khususnya pihak BPJS Cabang Kabuapten Pati perlu melakukan sosialisasi lebih banyak kepada pemilik industri informal serta memberikan sebuah sanksi kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya pada progam BPJS, serta perlu dilakukannya monitoring dari pihak Disnakertrans Kabupaten Pati terhadap Industri yang ada diwilayah Pati. Sedangkan untuk pihak Pemilik Industri sebaiknya memperhatikan kesejahteraan pekerja bahwa semakin lama bekerja juga semakin naik pendapatannya dan pemilik industri juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan mengikutsertakan kedalam Asuransi Kesehatan.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Pekerja Sektor Informal, Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal.

PENDAHULUAN

Tingginya pekerja sektor informal di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial yang mana sudah menjadi hak setiap warga negara. Sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan Jaminan Sosial Nasional.⁽¹⁾ Namun target pemerintah tersebut belum tercapai sepenuhnya. Selain faktor kebijakan pemilik industri informal yang seharusnya mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Nasional, hal itu juga didukung minimnya pengetahuan dan minat pekerja sendiri.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Silvira Hermanto pada Tahun 2014 tentang Kesiapan Pekerja Sektor Informal (sopir *container*) dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Semarang. Dalam penelitian itu dihasilkan rata-rata subyek penelitian tidak mengetahui tentang Jaminan Kesehatan Nasional.⁽²⁾ Minimnya minat pekerja untuk ikut dalam program jaminan sosial juga didukung dalam penelitian Triyono dan Soewartoyo. Keduanya meneliti tentang kendala kepesertaan Program Jaminan Sosial terhadap pekerja sektor informal di Surabaya. Penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas pekerja informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan dikarenakan kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri yaitu meliputi pendapatan, pengetahuan dan pendidikan.⁽³⁾

Dari hasil survei awal terhadap 5 pekerja informal disalah satu industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 12 Oktober 2015 bahwa dari 5 responden yang dijadikan responden untuk survei awal, 4 orang diantaranya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Mereka beralasan syarat untuk mengurus BPJS ribet serta kondisi pekerjaan mereka yang berpenghasilan tidak tetap sehingga membuat mereka semakin enggan untuk mengurus pendaftaran. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa banyak pekerja industri tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso masih minim yang ikut kepesertaan asuransi kesehatan yang sebagaimana sudah dituliskan dalam undang-undang UU No 40 Tahun 2004.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sangat diperlukan suatu penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan BPJS kesehatan pada pekerja sektor informal industri tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa angka-angka serta pengkategorian variabel penelitian. Kemudian data tersebut akan dianalisa secara statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, penelitian ini merujuk kearah penelitian kuantitatif yakni suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan variabel kemudian menganalisisnya secara statistik pada obyek penelitian yang ditentukan. Penelitian ini juga akan menggunakan rancangan *cross sectional* yaitu penelitian yang dilakukan dalam satu waktu.⁽⁶⁾ Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang kemudian akan dianalisa secara statistik dengan progam SPSS yang menggunakan Uji hubungan *C-Square*.⁽⁷⁾

HASIL

Tabel 4.7
Distribusi frekuensi Gaji Responden

Gaji Responden	Σ	%
<1 Juta	11	11,5 %
1 Juta-1,5 Juta	55	57,3 %
>1,5 Juta	30	31,2 %
Total	96	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan gaji sebesar 1 juta – 1,5 juta memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 57,3 %.

Tabel 4.8
Distribusi frekuensi Gaji Pekerja Sektor Informal
Industri Tepung Tapioka di Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati Tahun 2016

No	Pernyataan	Tidak		YA	
		F	%	F	%
1	Gaji yang diberikan pemilik industri telah sesuai dengan prestasi kerja saya	14	14,6	82	85,4%
2	Besar gaji yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat pendidikan saya	9	9,4	87	90,6
3	Jumlah gaji yang diberikan pemilik industri sudah sesuai dengan tenaga dan pikiran saya	27	28,1	69	71,9
4	Pembayaran gaji yang diberikan pemilik industri selalu tepat waktu	31	32,3	65	67,7
5	Gaji yang diberikan sudah cukup untuk kebutuhan keluarga saya	51	53,1	45	46,9
6	Gaji yang saya terima sudah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pati	11	11,5	85	88,5
7	Bila terjadi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan saya meminjam kepada pemilik industri	22	22,9	74	77,1
8	Ketika saya sakit menggunakan sebagian gaji untuk berobat	22	22,9	74	77,1
9	Setiap menerima gaji saya selalu menganggarkan untuk biaya kesehatan keluarga	38	39,6	58	60,4

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan tabel diatas pernyataan yang masih menjadi masalah adalah kecukupan gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dimana dari total responden yang ada sebanyak 53,1% mengaku gajinya tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya.

Tabel 4.9
Distribusi frekuensi kebijakan pemilik industri

Kebijakan Pemilik	Σ	%
Tidak	80	83,3 %
Iya	16	16,7 %
Total	96	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan tabel diatas bahwa pemilik industri tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS yakni dengan persentase sebesar 83,3 %.

Tabel 4,10
Distribusi frekuensi kebijakan pemilik industri Pekerja Sektor Informal
Industri Tepung Tapioka di Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati Tahun 2016

No	Pertanyaan	Tidak		Ya	
		F	%	F	%
1	Pemilik industri mengikutsertakan karyawannya dalam progam jaminan kesehatan BPJS	80	83,3	16	16,7
2	Pemilik industri selalu memberikan hak-hak kerja saya	27	28,1	69	71,9
3	Ketika ada karyawan yang sakit pemilik industri bertanggung jawab dengan memeriksakan kedokter/rumah sakit	47	49,0	49	51,0
4	Pemilik industri selalu mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin	74	77,1	22	22,9
5	Pemilik industri menyediakan APD untuk pekerjanya	52	54,2	44	45,8

Sumber : Data Primer 2016

Pernyataan pada variabel kebijakan pemilik industri yang belum sesuai dengan anjuran pemerintah antara lain mengikutsertakan karyawannya dalam progam jaminan kesehatan BPJS (83,3%), mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin (77,1%), menyediakan APD untuk pekerjanya (54,2%).

Tabel 4.11
Distribusi frekuensi Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan	Σ	%
Tidak	30	31,2 %
Iya	66	68,8 %
Total	96	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang tidak ikut dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 66 responden dengan persentase sebesar 68,8 %.

Tabel 4.12
Distribusi jawaban responden mengenai keikutsertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada pekerja informal tepung tapioka Kecamatan
Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2016

NO	Pertanyaan	Tidak		YA	
		F	%	F	%
1	Saya tertarik progam BPJS kesehatan yang diselenggarakan pemerintah	28	29,2	68	70,8
2	Saya tertarik progam BPJS Kesehatan karena sakit yang saya derita	44	45,8	52	54,2
3	Saya sama sekali tidak memiliki Asuransi Sosial maupun Komersil	30	31,2	66	68,8
4	Saya merasa dibebani untuk membayar iuran yang ditentukan pihak BPJS Kesehatan	45	46,9	51	53,1
Sumber	Saya tidak memahami prosedur untuk mendaftar menjadi peserta Asuransi BPJS Kesehatan	29	30,2	67	69,8
	Kantor BPJS terletak jauh dari tempat tinggal saya	29	30,2	67	69,8

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.11 yang masih menjadi permasalahan dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan pekerja Industri tepung tapioka Tahun 2016 antara lain beban untuk membayar iuran yang ditentukan pihak BPJS Kesehatan (53,1%), ketidakpahaman prosedur untuk mendaftar menjadi peserta Asuransi BPJS Kesehatan (69,8%), letak jauh dari tempat tinggal (69,8%).

Tabel 4.13
Kategori hubungan antara Gaji pekerja Industri tepung tapioka
dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan

Gaji pekerja	Keikutsertaan BPJS Kesehatan			
	Tidak		Ya	
	Σ	%	Σ	%
<1 juta	7	10.6 %	4	13.3 %
1 juta-1.5 juta	39	59.1 %	16	53.3 %
>1.5 juta	20	30.3 %	10	33.4 %
Total	66	100 %	30	100 %

Sumber : Data primer 2016

Dari total responden, yang tidak ikut progam asuransi BPJS Kesehatan kebanyakan berpenghasilan Rp.1.000.000-Rp.1.500.000,- yaitu dengan persentase sebesar 30.3 %, dimana dari total tersebut pekerja memiliki usaha sampingan yaitu memelihara ternak sebagai

usaha sampingan yang mana sebagai tabungan pekerja, tetapi pekerjaan sebagai buruh harian lepas pada industri tepung tapioka merupakan sebuah pekerjaan inti untuk mencukupi kebutuhan sehari hari pekerja

Hasil uji *C-Square* yang telah dilakukan dapat diketahui menunjukkan ada hubungan antara gaji responden dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan karena nilai *p-value* = 0,0001 dimana kurang dari 0,05.

Tabel 4.14
Kategori hubungan antara Kebijakan pemilik industri dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan

Kebijakan Pemilik Industri	Keikutsertaan BPJS Kesehatan			
	Tidak		Ya	
	Σ	%	Σ	%
Tidak	56	84.8 %	24	80.0 %
Iya	10	15.2 %	6	20.0 %

Sumber : Data primer 2016

Dari total responden, yang tidak ikut asuransi kesehatan kebanyakan tidak diikutsertakan oleh pemilik industrinya (56 responden yaitu sebesar 84.8 %). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk mengikutsertakan pekerja dalam asuransi kesehatan pemilik industri merasa tidak bertanggung jawab atas kepesertaan pekerja dalam asuransi kesehatan, tetapi pemilik industri hanya menganggarkan dana untuk pekerja saat mengalami kecelakaan ditempat kerja dan memberikan bantuan dana ketika pekerja atau keluarga pekerja saat mengalami sakit.

Hasil uji *C-Square* menunjukkan ada hubungan antara kebijakan pemilik industri dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dimana nilai *p-value* = 0,0001 kurang dari 0,05

Tabel 4.15
 Hasil Uji Hubungan antara Gaji Pekerja dan Kebijakan Pemilik industri dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan pada pekerja Informal Industri tepung tapioka diKecamatan Margoyoso kabupaten Pati Tahun 2016.

Variabel Bebas	Variabel Terikat	P value
Gaji pekerja	Kebijakan pemilik industri	0.0001
Kebijakan pemilik industri	Keikutsertaan BPJS Kesehatan	0.0001

Sumber : Data primer 2016

Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square*, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara gaji pekerja dengan kebijakan pemilik industri dan ada hubungan antara kebijakan pemilik industri dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal industri tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Tahun 2016. Karena berdasarkan hasil uji hubungan C-Square antara gaji responden dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kebijakan pemilik industri dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan hasil nilai p-value = 0,0001 dimana kurang dari 0,05.

PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Gaji Pekerja dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan

Semenjak dibentuk pada bulan Januari 2014, kehadiran BPJS diharapkan mampu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia. Melalui program BPJS ini, setiap warga negara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang ringan karena menggunakan sistem asuransi.

Akan tetapi, sejauh ini target kepesertaan BPJS belum sesuai harapan. Khususnya untuk tenaga kerja, mayoritas peserta merupakan pekerja formal sedangkan untuk pekerja informal terasa masih sulit untuk dijangkau. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pekerja sektor informal tepung tapioka di

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hanya 31,25% dari total responden.

Rendahnya serapan peserta pada sektor informal ini tentunya yang akan merasakan dampaknya juga para pekerja sendiri. Diketahui bahwa para pekerja informal khususnya pekerja tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Pati berpenghasilan dibawah UMR serta nilainya tidak tetap setiap bulan. Dari hasil wawancara menyebutkan sebagian besar yakni 57,29% responden berpenghasilan antara Rp.1.000.000 – Rp.1.500.00/bulan. Dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak yaitu lebih dari 3 orang per keluarga maka para pekerja harus sependai mungkin untuk membagi penghasilan mereka.

Sebagaimana diketahui, sistem penetapan gaji karyawan berdasarkan kesepakatan antar pemilik industri yang tergabung dalam Perserikatan Pemilik Industri Tepung Tapioka Desa Ngemplak Margoyoso Pati. Menurut Kunarto salah seorang pemilik industri di desa tersebut, setiap bulan anggota perserikatan pemilik industri ini berkumpul untuk membahas isu-isu terbaru mengenai industri mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga melakukan pembahasan mengenai gaji pekerja serta hak-hak yang diterima pekerja.

Sebagian besar pekerja sumber penghasilannya hanya mengandalkan industri tapioka ini. Dari gaji yang didapatkan, kebanyakan responden selalu menganggarkan untuk membiayai kesehatan keluarga baik itu dalam hal preventif maupun rehabilitatif. Namun tidak sedikit yang mengaku kekurangan biaya kebutuhan kesehatan sehingga harus meminjam dulu ke atasannya yakni pemilik industri. Hal ini merupakan dampak secara tidak langsung bila tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah.

Setelah dilakukan uji statistik, dinyatakan bahwa ada hubungan antara gaji pekerja dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan pada Pekerja Informal Tepung Tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 2015. Adanya faktor hubungan ini,

menunjukkan nilai gaji yang diperoleh seorang tenaga kerja terutama pekerja sektor informal sangat mempengaruhi dalam memutuskan kebijakan rumah tangga baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan kesehatan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisa Fajrianti pada Tahun 2015 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendapatan, persepsi dan sosialisasi dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri diwilayah Puskesmas Santok Kota Pariaman Tahun 2015.

Menurut pengakuan responden, sebagian besar dari mereka juga tertarik untuk ikut BPJS Kesehatan. Akan tetapi karena mayoritas mempunyai anggota keluarga banyak, otomatis kebutuhan juga banyak sehingga mereka tidak bisa menyisakannya untuk membayar premi iuran BPJS.

Selain itu dalam hal pengambilan keputusan dalam kepesertaan BPJS sangat berpengaruh dengan tingkat pendidikan responden, bahwa dari penelitian yang sudah dilakukan dari total responden yang tingkat pendidikannya SMA sebesar 20,8 %. Artinya sudah cukup banyak yang pendidikannya tinggi sehingga pengetahuan mereka mengenai pentingnya BPJS juga baik.

Adanya hubungan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Serlie Littik pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan kepemilikan asuransi. Dimana seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan, kepemilikan Askes pun semakin meningkat.⁽⁸⁾ Kesesuaian kedua penelitian ini sama-sama menyatakan jika pendapatan atau gaji melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kemungkinan untuk ikut Program Jaminan Sosial atau biasa disebut BPJS juga semakin tinggi.

Selain itu, hasil ini juga didukung dengan penelitian oleh Desy Rohmawati pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan pemilihan jenis iuran JKN.⁽⁹⁾ Hal ini dapat diartikan semakin tinggi pendapatan atau gaji maka seseorang akan memilih kelas jaminan yang tinggi, sebaliknya semakin rendah

pendapatan maka akan memilih kelas jaminan sosial yang lebih rendah bahkan tidak ikut jaminan sosial tersebut.

Kesimpulan diatas sejalan dengan hasil penelitian Vera-Hernandez pada tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan dan pendapatan adalah determinan yang penting, baik dalam permintaan pelayanan kesehatan maupun keputusan untuk memiliki asuransi.⁽⁹⁾ Dari uraian ini maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk ikut BPJS Kesehatan yakni pendapatan atau gaji.

B. Hubungan antara Kebijakan Pemilik Industri dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan

Kewajiban untuk ikut BPJS telah diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁽⁴⁾

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya mendaftarkan perusahaan dan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mendapat teguran tertulis dan dikenakan denda oleh pihak BPJS sampai dengan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik yakni berupa perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin bangunan.

Salah satu masalah yang sering dijumpai khususnya oleh para pemilik industri adalah terkait dengan pendaftaran BPJS atas para karyawan perusahaan mereka. Salah satunya yakni dalam pengurusan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dikenal Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Berdasarkan kenyataan dilapangan masih banyak pemilik industri yang belum tahu mengenai perubahan ini, sehingga mereka tidak mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Kesehatan yaitu

sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan hak-hak para karyawan seperti kesehatan dan dana pensiun.

Sebagaimana dari hasil wawancara terhadap pekerja sektor informal tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menyatakan sebagian besar pemilik industri tidak mengikutsertakan mereka dalam program Jaminan Kesehatan BPJS. Hal ini menandakan kalau pemilik industri terutama pada sektor informal belum menyadari betul akan jaminan kesehatan karyawannya. Sehubungan dengan status karyawannya yaitu sebagai pekerja lepas, hal ini menjadi faktor tersendiri bagi pemilik industri sehingga enggan mengikutsertakan karyawannya. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 bahwa perusahaan / pemilik industri wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Kesehatan dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman kurungan atau dikenakan denda, selain itu dalam hal pembayaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993 bahwa dalam pembayaran premi tenaga kerja dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap pekerja.⁽⁵⁾

Namun kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemilik industri. Karena pada dasarnya peraturan di bidang jaminan sosial khususnya berkaitan dengan Jaminan kesehatan tidak membedakan kualifikasi pemberi kerja yang wajib mendaftarkan pekerjaannya baik BPJS Kesehatan. Kondisi ini tampak dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 14 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Adapun yang dimaksud dengan Program Jaminan Sosial ini tentunya adalah Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan. Dengan begitu seseorang yang sudah diangkat sebagai karyawan wajib untuk diikutkan dalam Program Jaminan Kesehatan tersebut.

Meskipun tidak mengikutsertakan karyawannya dalam Program Jaminan Kesehatan ada beberapa pemilik industri yang secara rutin setiap bulan melakukan program pemeriksaan kesehatan. Adapun ketika ada karyawan yang mengalami sakit dan butuh pemeriksaan lebih lanjut, sebagian besar pemilik industri menanggung biaya kesehatan itu. Adanya biaya pengobatan dari pemilik industri ini membuat para karyawan tidak mau mengeluarkan uang tambahan setiap bulan untuk membayar premi BPJS. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi kepada para pemilik industri mengenai keuntungan mana yang lebih besar antara mengikutsertakan karyawan dalam Program Jaminan Sosial BPJS atau membiayai pengobatan karyawannya ketika sakit. Dengan begitu para pemilik industri tidak salah dalam mengambil kebijakannya.

Setelah dilakukan uji statistik didapatkan bahwa ada hubungan antara kebijakan pemilik industri dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan pada pekerja informal industri tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso tahun 2016. Adanya hubungan ini menunjukkan begitu pentingnya peran pemilik industri untuk mengajak serta mengikutkan karyawannya dalam program BPJS. Karena secara tidak langsung, para karyawan akan mengikuti peraturan dari pemilik industri.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono dan Soewartoyo pada tahun 2013 dimana mereka menyebutkan bahwa sebagian besar para pemilik industri informal di Kabupaten Brebes tidak mendukung adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mereka beralasan tidak mau mengeluarkan tambahan gaji untuk membayar premi dan juga tidak mau melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran tersebut.⁽⁹⁾

Berkaca dari penelitian keduanya, maka banyak perusahaan yang belum menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oleh sebab itu perlakuan sanksi oleh pemerintah seharusnya tidak hanya kepada perusahaan formal saja akan tapi juga mengarah ke

industri informal seperti tepung tapioka ini. Selain itu sosialisasi juga tetap harus dilakukan sampai timbul kesadaran para pemilik industri informal itu untuk ikut BPJS.

SIMPULAN

1. Sebanyak 39,6% umur pekerja informal industri tepung tapioka dengan kriteria 35-70 tahun, 76,0% berjenis kelamin laki dan 39,6% tingkat pendidikan pekerja lulus SMP.
2. Sebagian besar pekerja informal tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati berpenghasilan 1 juta-1,5 juta yaitu sebesar 30.3 % dimana kebanyakan jumlah anggota keluarganya sebanyak 3 orang lebih.
3. Sebagian besar pekerja informal menyatakan atasannya (pemilik industri) tidak mengikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan yakni sebanyak 84.8 % dari total responden.
4. Ada hubungan antara gaji pekerja dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan pada pekerja informal tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2016.

SARAN

1. Pemerintah
 - a. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak oleh pihak BPJS setempat kepada pemilik industri informal mengenai keuntungan mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Kesehatan.
 - b. Seharusnya pihak pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Kesehatan tidak hanya kepada perusahaan formal saja, melainkan juga kepada perusahaan maupun industri informal.
 - c. Pihak pemerintah sebaiknya melibatkan staf desa untuk membantu mensosialisasikan pemilik dan pekerja industri tepung tapioka agar dapat ikut serta dalam asuransi kesehatan.

- d. Sebaiknya pemerintah melihat program BPJS Kota lain dimana upaya-upaya terobosan apa saja yang dapat membantu untuk menumbuhkan minat dalam kepesertaan dalam asuransi kesehatan.
 - e. Adanya monitoring dari pihak Disnakertrans Kabupaten Pati terhadap Industri yang ada diwilayah Pati.
2. Pemilik Industri
- a. Sebaiknya dalam pabrik industri tepung tapioka Kecamatan Margoyoso memperhatikan jenjang karir, dimana semakin lama bekerja juga semakin naik pendapatan karyawannya.
 - b. Sebaiknya pemilik industri tepung tapioka memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan mengikutsertakan pekerja kedalam asuransi Kesehatan.
 - c. Sebaiknya dalam paguyuban perkumpulan pemilik industri tepung tapioka dapat meningkatkan jadwal perkumpulan untuk membahas kebutuhan serta gaji pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Ajeng Silvira Hermanto. *Kesiapan Pekerja Sektor Informal (sopir container) dalam Membayar Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Semarang*. Skripsi. 2014
3. Triyono dan Soewartoyo. *Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja Sektor Informal di Surabaya*. Skripsi. 2010.
4. Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
5. Kemenaker. *Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019*. 2014.
6. Bambang prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali pers. 2011.
7. Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
8. Desy Rohmawati. *Hubungan antara pendapatan dengan pemilihan jenis iuran JKN*. 2014. Didownload dari <http://eprints.ums.ac.id/32416/20/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
9. Triyono dan Soewartoyo. *Sikap pemilik industri informal di Kabupaten Brebes tidak mendukung adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional*. 2013. Didownload dari <http://eprints.uinjkt.ac.id/pdf>.